



# Implementasi Kebijakan Smart City dalam Mewujudkan Makassar Kota Dunia

## *Smart City Policy Implementation in Realizing Makassar a World City*

Annisa Nurdiassa, \*Achmad Zulfikar, Fatmawati Rasyid, Andi Tika Wulandari

<sup>1</sup> Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Hasanuddin

<sup>2</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>3</sup> Pusat Riset dan Pengembangan, Perkumpulan Sarjana Hubungan Internasional Indonesia

### ARTIKEL INFO

Corresponding author;  
[apa@kabarfikar.com](mailto:apa@kabarfikar.com)

**Kata Kunci:**  
implementasi kebijakan;  
kota makassar;  
smart city;

**Keywords:**  
policy implementation;  
makassar city;  
smart city;

**Doi:**  
<https://doi.org/10.22487/jpag/v3i1.114>

### ABSTRAK

Perkembangan zaman telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Di masa ini, peradaban manusia telah memasuki era revolusi industri 4.0 dengan berbagai kemajuan teknologi. Hal ini menjadi suatu terobosan baru yang digunakan oleh kota Makassar untuk memberikan layanan yang maksimal bagi penduduknya. Sehingga, muncul konsep *Smart City* untuk menciptakan Makassar kota Dunia. Konsep-konsep tersebut berkembang berdasarkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola kota. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran studi implemtasi, konsep *Smart city* dan model *Smart city* dengan metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis data ini terdiri dari reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran serta menganalisa perkembangan politik dan pemerintahan di era digital.

The development of the times has brought great changes in human life. At this time, human civilization has entered the era of the industrial revolution 4.0 with various technological advances. This has become a new breakthrough used by the city of Makassar to provide maximum services for its inhabitants. Thus, the concept of Smart City emerged to create the Makassar city of the World. These concepts are developed based on the application of information and communication technology in managing cities. This study uses the framework of the implementation study, the concept of Smart City and the Smart City model with descriptive qualitative research methods using data analysis techniques from Miles and Huberman. Analysis of this data consists of reduction, presentation of data, drawing conclusions. The purpose of this research is to provide an overview and analyze political developments and government in the digital age.



## PENDAHULUAN

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintah kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan secara luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga tahap evaluasi (Dahyar Daraba et al., 2020). Seiring dengan perkembangan zaman, dunia telah mengalami perubahan, dimana kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 dimana teknologi informasi menjadi basis dalam kehidupan manusia, segala hal menjadi tanpa batas (*borderless*), data yang tak terbatas (*unlimited*) dan dipengaruhi oleh perkembangan internet serta teknologi digital yang sangat masif. Kemajuan teknologi ini juga menjadi suatu terobosan baru yang digunakan oleh kota Makassar untuk memberikan layanan yang semaksimal mungkin bagi penduduknya. Sehingga, muncul konsep *Cyber City* dan *Smart City*. Konsep-konsep tersebut berkembang berdasarkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola kota (Indiahono, 2009).

Kota-kota yang disebut smart city adalah kota yang pada awalnya memiliki terobosan baru dalam penyelesaian masalah di kotanya dan sukses dalam meningkatkan performa kotanya (Insani, 2017). Konsep smart city juga merupakan konsep mengatasi kendala dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan publik (Gunartin, 2018). Dalam konteks Indonesia, perkembangan teknologi informasi terjadi hampir di seluruh aspek, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan kehidupan masyarakat (Herdiana, 2019). Tujuan implementasi Smart City adalah untuk dapat membentuk dan menerapkan suatu kota yang aman, nyaman, terkendali dan mempermudah akses bagi warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian, sosial dan teknologi (Conoras & Hikmawati, 2018).

Konsep *Smart city* ini di usung dimasa pemerintahan walikota Dhany Pomanto sebagai sarana pemerintah kota Makassar dalam pelayanan masyarakat secara meluas dan merata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk menciptakan Makassar kota Dunia. Dalam hal ini tentu membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi bersama khususnya dalam melakukan implementasi dari semua kebijakan (Ismail, 2009). Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini suatu proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan, salah satunya adalah implementasi kebijakan mengenai *Smart City* yang dijelaskan oleh wakil presiden Jusuf Kalla yang meluncurkan program Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) pada tahun 2015 di Balai Sidang Jakarta pada tanggal 24 Maret 2015. Program tersebut adalah salah satu cara dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah kota Makassar sendiri melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh walikota periode sebelumnya juga sudah menerapkan kebijakan Makassar *Smart City*, yang memiliki focus terhadap pelayan publik berbasis teknologi yang sering disebut sebagai elektronik pemerintah (E-Pemerintahan).

Penerapan e-Pemerintahan dalam pelayanan publik menjadi sebuah tuntutan dan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya sesuai dengan Keppres no.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Pemerintahan, sedangkan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 2009. Aturan tersebut pada intinya adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta banyak manfaat positif lainnya maka e-Pemerintahan merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan. Penerapan e-Pemerintahan di Kota Makassar dilaksanakan berdasarkan Perda No. 3 tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kota Makassar, dan pasal 21 bahwa dinas komunikasi dan informatika mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi, meliputi pengembangan informasi, aplikasi dan telematika, pendayagunaan media, pemberdayaan kelembagaan serta



pos dan telekomunikasi, serta perda kota Makassar No. 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Makassar tahun 2014-2019 pasal 5 ayat (3) bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat visi, misi, arah kebijakan dan program prioritas walikota dan wakil walikota.

Konsep e-Pemerintahan di kota Makassar dikemas dalam program *Smart City* yang berusaha diwujudkan melalui visi yang dikemukakan walikota dan wakil walikota saat kampanye pemilihan pasangan walikota dan wakil walikota, yaitu: mewujudkan kota dunia untuk semua, dengan subvisi: tata lorong bangun kota dunia, serta melalui 3 misi utama, yaitu; (1) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi sejahtera standar dunia, (2) Mereformasi tata birokrasi yang tidak efektif menjadi pelayanan publik kelas dunia (3) Merestorasi tata kota yang tidak nyaman menjadi kota nyaman dunia. Visi ini kemudian dipertegas dalam perda kota Makassar No.5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2014-2019 pasal 4 Ayat (2) bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi pemerintah Kota Makassar 2019, yakni menjadikan “makassar kota dunia yang nyaman untuk semua pada tahun 2019”.

Implementasi dari program *Smart City* terutama dalam mencapai misi, mereformasi tata birokrasi yang efektif menjadi pelayanan publik kelas dunia yaitu dibuatnya portal pelayanan terhadap warga kota Makassar melalui [www.makassarkota.go.id](http://www.makassarkota.go.id) yang memiliki beberapa fitur, yaitu: e-Puskesmas, portal *Smart City*, e-Sibuntulu (Situs Inspirasi dan Aspirasi Warga Makassar), Udoctor, perijinan online, e-Galeri (Situs Galeri Kota Makassar), GIS *Smart City*, dan e-Wisata (Aplikasi Wisata Kota Makassar). Selain itu, ada juga portal [www.makassartidakrantasa.com](http://www.makassartidakrantasa.com) yang memiliki fitur pengaduan warga, kuliner, e-office, e-pemerintahan, e-puskesmas, dan kuciniki. Kedua website pelayanan publik ini di kelola oleh admin yang berbeda.

Website [www.makassarkota.go.id](http://www.makassarkota.go.id) dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika, sedangkan website [www.makassartidakrantasa.com](http://www.makassartidakrantasa.com) dikelola oleh PT Telkom. Pengembangan dari website [www.makassartidakrantasa.com](http://www.makassartidakrantasa.com) kemudian memiliki fitur e-pemerintahan yang khusus dirancang untuk memberikan pelayanan publik dari pemerintah tingkat kelurahan kepada warga yang bermukim di wilayah kerja kelurahan. Namun dalam implementasinya program Makassar *Smart City* masih memiliki banyak kekurangan seperti halnya dalam hal sosialisasi yang masih belum merata di kalangan masyarakat itu sendiri jadi masih banyak masyarakat yang belum mengerti konsep dari Makassar *Smart City* yang berdampak pada tidak maksimalnya penerapan kebijakan nya itu sendiri.

## KERANGKA TEORI

### Studi Implementasi

Studi implementasi ini merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak dapat di jauhi dengan adanya intervensi dalam berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting di dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya suatu pencapaian tujuan. Muffiz yang dikutip oleh Kahya dan Zenju (1996:45) dalam bukunya “Pengantar Ilmu Administrasi Negara (suatu pokok bahasan)”, sebagai berikut: implementasi kebijakan merupakan aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Kesulitan yang timbul pada tahap ini adalah sukarnya menentukan hasil kebijakan, karena adanya dampak yang tidak terantisipasi sebelumnya. George C. Edward mengembangkan model implementasi kebijakan yang bersifat *top-down* yang dikenal dengan *direct and indirect impact on implementation* di mana terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi dalam kebijakan publik. Empat variabel tersebut, antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi.



### Konsep *Smart City*

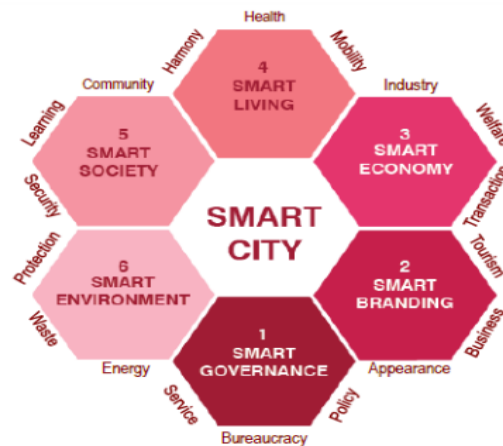
Pemerintah kota Makassar membuat konsep *Smart City*, antara lain seperti:

1. Sebuah kota yang berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, lingkungan hidup;
2. Sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung. Sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya serta merencanakan pencegahannya;
3. *Smart City* dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial dan bisnis, infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota;
4. Penggunaan *smart computing* untuk membuat *smart city* dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan dan efisien.

### Model *Smart City*

Berikut dibawah ini model konsep *smart city* yang dirancang oleh pemerintah daerah kota Makassar dengan dimensi-dimensi yang terdapat di dalam *smart city* itu sendiri, sebagai berikut:

Gambar 1. Dimensi *Smart City*



Sumber: Citiasia Center for Smart Nation

Pada gambar di atas dapat digambarkan bahwa di dalam *smart city* terdapat 6 konsep, seperti *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, *Smart Environment*.

1. *Smart Governance*, dapat diartikan sebagai tata kelola yang pintar, di mana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintahan sebagai instansi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. *Smart Governance* ini di dalam dimensi *smart city* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi, sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Sasaran dari *smart governance* adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan diadopsi oleh teknologi yang terpadu. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (service), birokrasi, dan kebijakan (policy).



2. *Smart Branding*, atau dapat disebut dengan branding daerah. *Smart branding* yang dimaksud di sini adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengemban tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Sasaran dari *smart branding* ini adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional.
3. *Smart Economy* atau tata kelolaan perekonomian yang pintar. *Smart economy* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era reformasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Sasaran dari dimensi ini adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era reformasi seperti saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program di antaranya mewujudkan *less cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam *smart economy*, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.
4. *Smart Living*, ini bertujuan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu: kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *smart city*.
5. *Smart Society*, ini banyak membahas mengenai manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam *smart city*, interaksi antara manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Sasaran dari *smart society* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik dalam bentuk fisik, maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran ini diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam *smart society*, yaitu komunitas warga, ekosistem pembelajaran, dan sistem keamanan.
6. *Smart environment* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, di mana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Tujuan dari dibentuknya *smart environment* adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, di mana hal tersebut tidak dapat dihilangkan dengan lahirnya ide tentang *smart city* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

## METODE

Dalam memformulasikan hasil kajian, maka diperlukan serangkaian metodologi, baik dalam proses pengumpulan data dan informasi yang kemudian diolah melalui teknik analisis hasil penelitian (Indra Pratama Putra Salmon, 2019). Tipe dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (Jumardi et al., 2019) yang berusaha menggambarkan secara detail masalah yang akan diteliti yang didapatkan langsung dilapangan sesuai keadaan objek yang diteliti (Sadia et al., 2019). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Herdiansyah, 2011). Permasalahan penelitian akan dijelaskan berdasarkan data yang berhasil dikumpul secara deskriptif sehingga menjadi jelas dan konkrit sesuai dengan fokus penelitian (Daswati et al., 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kajian pustaka/literatur. Dengan menganalisis dengan mengkomparasikan beberapa teori dan konsep terkait (Arifin, 2019). Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari berbagai buku literatur dan dokumen-dokumen terkait dengan Smart City. Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis data ini terdiri dari reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan.



## HASIL DAN DISKUSI

*Smart City* adalah pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Program Makassar *smart city* diluncurkan tepat di hari pelantikan Dhani Pomanto – Daeng Ical. Hanya dalam beberapa hitungan jam setelah prosesi pelantikan, walikota Makassa Dhani Pomanto menandatangani kerjasama untuk mewujudkan *smart city* dengan mitranya Microsoft dan PT. Telkom di hotel Imperial Aryaduta. Hal ini menindaklanjuti mengenai pemberian penguatan informasi dan teknologi kepada para guru, penyediaan jaringan koordinasi dalam pemerintahan dan rencana interkoneksi city net atau interaksi kota-kota sedunia.

Dhani Pomanto atau biasa dipanggil dengan sebutan DP ini bahkan mengajak Microsoft untuk berinvestasi di Makassar dalam bentuk pendirian training center. Setelah Makassar meraih juara di Indonesia Digital Societ Award (IDSA) tahun 2014 support terhadap Makassar *smart city* semakin nampak. Kriteria penilaian berdasarkan empat aspek, yakni: *intiative, leadership, usership, dan benefit*. Penilaian ini dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pelayanan kesehatan, UKM swasta dan masyarakat. Masyarakat merupakan bagian penting dari terciptanya *smart city*, karena dengan demikian kebiasaan-kebiasaan yang dulu mulai ditinggalkan. Proyek *smart city* berdampak pada kualitas hidup warga dengan tujuan menjadikan sebuah kota menjadi lebih efisien. Masyarakat juga dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kota yang aktif. Masyarakat juga adalah faktor yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan terciptanya *smart city*.

Kebijakan perpindahan dari sebuah kota biasa menjadi *smart city* memerlukan interaksi komponen teknologi dengan politik dan kelembagaan. Komponen politik mewakili berbagai elemen dan tekanan eksternal, seperti kebijakan politik yang mungkin memengaruhi ide dari pembuatan *smart city*. Konteks kebijakan sangat penting bagi pemahaman dari penggunaan sistem informasi. Pemerintah yang inovatif yang ikut serta dalam membangun *smart city* menekankan perubahan dalam suatu kebijakan. Perubahan dalam suatu kebijakan ini menyebabkan adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam menunjang terwujudnya Makassar sebagai *smart city* adalah sebagai berikut:

### 1. Kendala Kelembagaan

Saat ini model kelembagaan dalam pengelolaan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintah kota makassar belum tercipta suatu sistem yang terintegrasi satu sama lain serta belum terdapat satu unit yang bertanggung jawab langsung pada Walikota (pimpinan daerah) yang mempunyai tingkat kewenangan yang setara dengan badan atau dinas terhadap hal sebagai berikut: Melakukan koordinasi dan perencanaan secara menyeluruh dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan Kota Makassar. Melakukan standarisasi arsitektur system, standarisasi data dan informasi yang di butuhkan guna menjamin interoperabilitas system yang aan di terapkan Mengelola Portal Informasi pemerinta daerah dan gateway informasi manajemen pemerintahan daerah yang akan menghubungkan system ini dan jaringan internet maupun intranet Membantu perencanaan system dan pengembangan system informasi dibutuhkan di masing-masing unit *help desk* Mengelola prasarana dan sarana yang di butuhkan secara bersama-sama dalam pengoperasian Sistem Informasi manajemen Pemerintahan Daerah seperti jaringan utama (*backbone*) berbagai server mail, DNS dan berbagai jaringan utama basis data perusahaan (Amri, 2016).

### 2. Kendala Hukum dan Perundang-undangan

Pemerintah Kota Makassar saat ini belum mempunyai perangkat hukum dan perundang-undangan yang mengatur penerapan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi diberbagai sektor pemerintahan. Perangkat hukum dan perundang-undangan sangat membutuhkan guna memperkecil



dampak negatif serta menjamin hak-hak individu baik hak untuk kesetaraan akses informasi maupun hak perlindungan *privacy*. Oleh karena itu kami sementara mengkaji dan mengkonsep atauran terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk diterapkan di Kota Makassar nantinya. Hukum dan perundangan-undangan yang dibutuhkan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini harus mampu memberikan perlindungan pada beberapa hak yang bersifat sangat fundamental antara lain kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan penyampaian informasi, hak untuk mendapat perlindungan *privacy*, hak untuk mendapatkan akses pada datadata pemerintah dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual jaringan (Amri, 2016).

### 3. Kendala Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu, SDM internal dan eksternal. SDM internal adalah pegawai pemerintahan, sedangkan eksternal adalah masyarakat daerah pada umumnya. Dalam kondisi saat ini pegawai pemerintah Kota Makassar belum memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara professional untuk menunjang tugas dan kewajiban kerjanya. Jenis dan kemampuan yang dituntut sangat beragam tergantung pada posisi dan tugasnya. Masyarakat adalah kota makassar merupakan pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang diberikan pemerintah untuk peyanan secara online. Kendala yang di hadapi untuk mewujudkan Makassar Smart City adalah dari Masyarakat. Ketinggalan masyarakat dalam pemanfatan TIK akan berdampak langsung pada suksesnya pelayanan masyarakat dengan menggunakan aplikasi Teknologi informasi dan komunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar (Amri, 2016).

### 4. Kendala Infrastruktur

Berbagai jenis aplikasi / sistem informasi telah diterapkan di Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang berbasis elektronik. Masing-masing SKPD membutuhkan aplikasi-aplikasi yang sesuai dan berfungsi untuk mendukung proses kerja di SKPD masing-masing. Aplikasi sistem informasi yang diterapkan saat ini dirancang dan dibuat oleh SKPD masing-masing sehingga data base yang dihasilkan tidak terkoneksi dengan data base SKPD yang lain. Aplikasi dan data base tersebar di masing-masing SKPD. Jaringan WAN eksisting menggunakan Telkom speedy, tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk pengadaan komunikasi di sector ini sudah cukup baik, akan tetapi dengan konfigurasi pengendalian seperti kegiatan ini teknologi informasi dan komunikasi, maka disetiap SKPD relatif sulit dilaksanakan karena setiap SKPD sangat independent untuk mengelola jaringannya sendiri. Setiap unit langsung terhubung ke internet internasional. Jaringan yang ada sekarang adalah setiap SKPD bebas melakukan interaksi dengan internet sehingga tidak terjaga keamanan transaksi data dan informasinya, sangat rawan terhadap intrusi, karena setiap titik berada di area terbuka yang langsung berhadapan dengan publik (Amri, 2016).

Selama 5 tahun menjabat sebagai Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menjadikan Makassar Kota Dunia yang nyaman bagi semua. Hal tersebut disampaikan Danny Pomanto dalam pidato rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018 dan LKPJ akhir masa jabatannya masa periode 2014-2019 Pencapaian Makassar menjadi kota yang nyaman bagi semua itu seiring pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Makassar di bawah kepemimpinan Danny Pomanto bersama Wakilnya, Syamsul Rizal. Hal itu sesuai dengan visi dan misi kepemimpinan Danny Pomanto, yakni merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berkelas dunia, dan mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi membahas terkait pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar selama tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang berarti sebagaimana tercermin pada sejumlah indikator makro sosial ekonomi Kota Makassar, diantaranya, adalah pertumbuhan ekonomi



Kota Makassar terus bergerak naik dan berada di atas rata-rata Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi sentral ekonomi di Pulau Sulawesi dan jadi kota termaju di Kawasan Timur Indonesia. Dengan pencapaian itu, Danny mengatakan, angka kemiskinan di Kota Makassar menurun dari 4,49 persen (Tahun 2014) menjadi 4,41 persen (Tahun 2018). Begitu pula dengan ketimpangan pendapatan atau gini rasio, yang sering kali menjadi permasalahan di kota-kota besar.

Pencapaian visi-misi itu tak lepas dari dilaksanakannya program-program strategis yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar. Program tersebut antara lain adalah Home Care, Badan Usaha Lorong (BULO), Lorong Garden (Longgar), Bank Sampah, Kanrerong, dan berbagai pelatihan kewirausahaan berbasis lorong lainnya. Lebih lanjut, garis besar hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama kurang lebih 5 tahun dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar yakni Pelaksanaan pembangunan daerah sendiri terdiri dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib baik Pelayanan Dasar maupun Non-Pelayanan Dasar dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan. "Pencapaian dari sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, pengendalian banjir dan genangan, layanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan tanggap bencana, pelaksanaan urusan ketenagakerjaan melalui job fair. Pencapaian program kerja selama 5 tahun, Danny Pomanto pun mendapat 178 penghargaan baik ditingkat nasional, provinsi dan dari lembaga lainnya. Penghargaan itu merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi pihak luar atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pencapaian kesejahteraan masyarakat selama hampir lima tahun ini (Gewati, 2019). Adapun 178 penghargaan tersebut, beberapa diantaranya adalah:

1. Penghargaan Adiwiyata Mandiri Tahun 2015
2. Piala Adipura Tahun 2015, Piala Adipura Kirana Kategori Metropolitan Tahun 2016 dan Piala Adipura Kirana Tahun 2017 Kategori Kota Metropolitan
3. Penghargaan Swasti Saba Wistara Tahun 2015
4. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2015 dan Tahun 2016
5. Penghargaan Nasional dari Kementerian Dalam Negeri RI atas prestasi kinerja dengan predikat Sangat Tinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015
6. Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2015, Tahun 2016, 2017 oleh BPK RI
7. Penghargaan The Best Marketeers of The Year Tahun 2015 oleh Mark Plus Incorporation
8. Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terbaik Nasional Tahun 2016
9. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2016 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
10. Top Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018
11. Kepala Daerah Inovatif Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 oleh Sindo Awards
12. Kepala Daerah Terbaik di Indonesia Tahun 2017 oleh Tempo Award
13. Penghargaan Open Government Leadership Tahun 2017 oleh Pemerintah Singapura
14. Adipura ASEAN Kategori Clean Land Tahun 2017
15. Mayor of The Year Kategori Rising Star Tahun 2017 oleh Government Insider Singapore
16. Peringkat 1 Kota Berkinerja Terbaik/Tertinggi Secara Nasional Tahun 2017 oleh Presiden Republik Indonesia
17. Penghargaan Smart City Award 2017 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
18. Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2017
19. Penghargaan Bidang Pelayanan Publik Bidang Perizinan, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta Bidang Kesehatan oleh Kementerian PAN-RB RI Tahun 2018
20. Smart City Innovative Application Awards Tahun 2018 kategori smart mobility untuk inovasi Passikola
21. Daerah Berkinerja Terbaik Ke-2 LPPD Nasional Tahun 2018 oleh Kementerian Dalam Negeri RI





22. Kota Terbaik Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Award 2018 oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo
23. Peringkat Wisata Kota Sehat Tahun 2018 oleh Kementerian Kesehatan RI
24. Innovative Government Award (IGA) Tahun 2018 oleh Kementerian PAN-RBRI.

## KESIMPULAN

Makassar menyambut revolusi industry 4.0 dengan meningkatkan efektifitas pelayanan diberbagai sektor dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menciptakan Makassar kota Dunia. Kota Makassar dimasa pemerintahan Walikota Danni Pomanto telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor penting dalam pembangunan daerah. Adapun terkait implementasi kebijakan, Konsep *Smart city* adalah kebijakan pemerintah yang di usung dimasa pemerintahan walikota Danny Pomanto sebagai sarana pemerintah kota Makassar dalam pelayanan masyarakat secara meluas dan merata. *Smart City* dapat didefinisikan menjadi enam dimensi,yaitu *smart living, smart economy, smart governance, smart branding, smart environment, smart society*. Enam dimensi itu berhubungan dengan teori regional dan neoklasik pertumbuhan dan pembangunan perkotaan tradisional. Secara khusus, dimensi tersebut didasarkan pada daya saing masing-masing daerah, seperti transportasi, TIK, ekonomi, sumber daya alam, sosial, pemerintahan, dan lain-lain.

**REFERENSI**

- Amri. (2016). Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Menunjang Terwujudnya Makassar Sebagai "Smart City." *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5(2).
- Arifin, I. (2019). Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 55–61.
- Conoras, M. E. B., & Hikmawati, N. K. (2018). Smart City Peluang Dan Tantangan Untuk Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. *Konferensi Nasional Sistem Informasi*, 8–9.
- Dahyar Daraba, Ribka Christy, & Clara Saroinsong. (2020). Dampak Reklamasi Pantai Boulevard Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. *Journal of Public Administration and Government*, 2(1), 27–34. <https://doi.org/10.22487/jpag.v2i1.37>
- Daswati, Hajar Anna Patunrangi, Syamsidar, & Sukmawati. (2020). Koordinasi Camat Dalam Pengelolaan Kearsipan di Kantor Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. *Journal of Public Administration and Government*, 2(1), 8–13. <https://doi.org/10.22487/jpag.v2i1.34>
- Gewati, M. (2019). Dalam 5 Tahun Danny- Pomanto Ubah Makassar Jadi Kota Dunia yang Nyaman. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2019/04/23/07185821/dalam-5-tahun-danny-pomanto-ubah-makassar-jadi-kota-dunia-yang-nyaman?page=all#page1>
- Gunartin, G. (2018). Analisa Faktor-Faktor Kendala Ketercapaian Smart Mobility Dalam Upaya Menuju Konsep Smart City (Studi Pada Kota Tangerang Selatan). *Inovasi*, 5(2), 33. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v5i2.y2018.p33-41>
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages). *JURNAL IPTEKKOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.1.2019.1-16>
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Indiahono, D. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik*. Gava Media.
- Indra Pratama Putra Salmon, I. (2019). Penerapan Collaborative Governance dalam Pengentasan Kumuh dan Isu Pengembangan Potensi Lokal Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang. *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 21–34.
- Insani, P. A. (2017). Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 25–31. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1423>
- Ismail, N. (2009). *Public Policy*. PMN.
- Jumardi, Muhiddin, A., & Khaerah, N. (2019). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. *Journal of Public Administration and Government*, 1(1), 23–26. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i1.13>
- Sadia, H., Mustari, N., St. Nurmaeta, & Razak, F. S. H. (2019). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis Di Kabupaten Bone. *Journal of Public Administration and Government*, 1(1), 39–45. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i1.16>